Membangun Jawa Tengah yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk **penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.**

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi ruang demokrasi yang **inklusif, partisipatif,** dan **aksesibel** bagi semua kelompok masyarakat.

Pembangunan harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal (***No One Left Behind***).



Bersama, kita wujudkan Jawa Tengah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, **untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.**

PARTISIPATIF
Semua suara berarti

INKLUSIF
Tidak ada yang tertinggal

BERKEADILAN
Pembangunan untuk semua

AKSESIBEL
Ruang dan informasi dapat diakses semua

BERKELANJUTAN
Untuk kesejahteraan generasi kini dan nanti

JAWA TENGAH INKLUSIF

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Mengapa Kelompok Rentan Harus Dilibatkan?

Kelompok Rentan

- Penyandang Disabilitas
- Perempuan
- Anak
- Lansia
- Masyarakat Miskin
- Kelompok Rentan Lainnya

Pembangunan sering kali menghadapi persoalan:

- Kemiskinan masih terkonsentrasi pada kelompok rentan.
- Akses layanan publik belum sepenuhnya inklusif.
- Masih terdapat hambatan fisik, sosial dan kelembagaan bagi difabel.
- Kelompok rentan belum optimal terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- Aspirasi kelompok rentan sering tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.



Akibatnya:

Program pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat rentan.

Pembangunan yang inklusif adalah kunci terwujudnya **Jawa Tengah yang maju, adil dan berkelanjutan**

SIAPA YANG DIMAKSUD KELOMPOK RENTAN?

> “Pembangunan inklusif dimulai dari pengakuan, penghargaan, dan pelibatan semua.”

Kelompok rentan meliputi:

Penyandang Difabel

- Difabel fisik
- Difabel sensorik
- Difabel intelektual
- Difabel mental

Kelompok Rentan Lainnya

- Perempuan
- Anak
- Lansia
- Masyarakat miskin
- Korban kekerasan
- Kelompok marginal
- Masyarakat di wilayah terpencil
- Kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi



Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal.
Semua berhak berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama.

Mewujudkan Jawa Tengah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan dengan melibatkan semua kelompok dalam perencanaan dan pembangunan.

KESBANGPOL
Jawa Tengah

DASAR HUKUM

PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN ADALAH HAK KONSTITUSIONAL

UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 28H ayat (2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (2)
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Pasal 34 ayat (3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

ARTINYA:
PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN ADALAH HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.

UU NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menegaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

UU NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Mengatur:
- Kesamaan kesempatan
- Partisipasi politik
- Partisipasi sosial
- Aksesibilitas
- Pelibatan dalam pembangunan

PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
HANYA DAPAT TERWUJUD JIKA SEMUA KELUARGA DILIBATKAN

DIFABEL · PEREMPUAN · ANAK · LANSIA · MASYARAKAT MISKIN · KELOMPOK RENTAN LAINNYA



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

REGULASI JAWA TENGAH
YANG MENDUKUNG DIFABEL DAN KELOMPOK RENTAN

1 PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DIFABEL

Peraturan ini menjadi landasan utama perlindungan hak penyandang difabel di Jawa Tengah. Perda mengatur:

- Hak-hak penyandang difabel
- Aksesibilitas
- Partisipasi masyarakat
- Pengarusutamaan disabilitas
- Unit Layanan Disabilitas
- Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program
- Koordinasi lintas sektor
- Pendanaan dan penghargaan

PRINSIP PENTING

yang ditegaskan dalam Perda ini antara lain:

- ✓ Tanpa diskriminasi
- ✓ Partisipasi penuh
- ✓ Kesamaan kesempatan
- ✓ Kesetaraan
- ✓ Aksesibilitas
- ✓ Inklusivitas

RELEVANSI TERHADAP MUSRENBANG

Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyandang difabel dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.



2 PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024

Pergub ini merupakan petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2023.

Mengatur secara lebih teknis mengenai:

- Pendidikan inklusif
- Ketenagakerjaan
- Kewirausahaan
- Kesejahteraan sosial
- Habilitasi dan rehabilitasi
- Unit Layanan Disabilitas
- Mekanisme koordinasi
- Pendanaan dan implementasi kebijakan disabilitas di Jawa Tengah



Regulasi yang kuat adalah komitmen Jawa Tengah **mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan** untuk difabel dan seluruh kelompok rentan.

TANPA DISKRIMINASI | PARTISIPASI PENUH | KESETARAAN | AKSESIBILITAS | INKLUSIVITAS

KESBANGPOL
Jawa Tengah

MUSRENBANG

SEBAGAI RUANG DEMOKRASI PARTISIPATIF

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

Musrenbang bukan sekadar forum usulan program.

Musrenbang adalah:

Sarana
- Demokrasi partisipatif

Sarana
- Pendidikan politik masyarakat

Sarana
- Penguatan kewargaan

Sarana
- Penyelarasan kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintath

Karena itu kelompok rentan harus hadir sebagai :

SUBJEK PEMBANGUNAN,
bukan sekadar objek penerima bantuan.

DIFABEL · PEREMPUAN · ANAK · LANSIA · MASYARAKAT MISKIN · KELOMPOK MARGINAL



ALUR MUSRENBANG

Tingkat Desa
Musrenbangdes

↓

Tingkat Kecamatan
Musrenbangcam

↓

Tingkat Kabupaten/Kota
Musrenbangkab/Kota

↓

Tingkat Provinsi
Musrenbang Provinsi

↓

Tingkat Nasional
Musrenbangnas

Semakin awal kelompok rentan terlibat, semakin besar peluang usulan mereka terakomodasi.

INKLUSIF
Mengakomodasi semua kelompok masyarakat

PARTISIPATIF
Semua warga punya hak untuk menyuarakan ide

BERKEADILAN
Setiap kebutuhan dihargai dan diprioritaskan

TRANSPARAN
Proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

BERORIENTASI HASIL
Usulan masyarakat menjadi kebijakan nyata

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

MENGAPA HARUS TERLIBAT DALAM MUSRENBANG?

Karena kita paling memahami kebutuhan yang dihadapi sehari-hari.

Contoh usulan yang sering muncul:

- Jalur kursi roda
- Trotoar aksesibel
- Sekolah inklusi
- Pelatihan kerja
- Alat bantu disabilitas
- Transportasi ramah difabel
- Pendampingan usaha ekonomi
- Perlindungan perempuan difabel



Tidak ada yang lebih memahami kebutuhan difabel selain difabel itu sendiri.

AKSESIBEL | PARTISIPATIF | INKLUSIF | BERKEADILAN | BERDAYA | TANPA DISKRIMINASI

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

TANTANGAN
KETERLIBATAN DIFABEL DALAM MUSRENBANG

Beberapa kendala yang masih dihadapi:

HAMBATAN FISIK

- Lokasi rapat tidak aksesibel
- Tidak tersedia jalur kursi roda
- Tidak ada fasilitas pendukung



HAMBATAN INFORMASI

- Undangan tidak sampai kepada komunitas difabel
- Informasi tidak tersedia dalam format yang mudah diakses



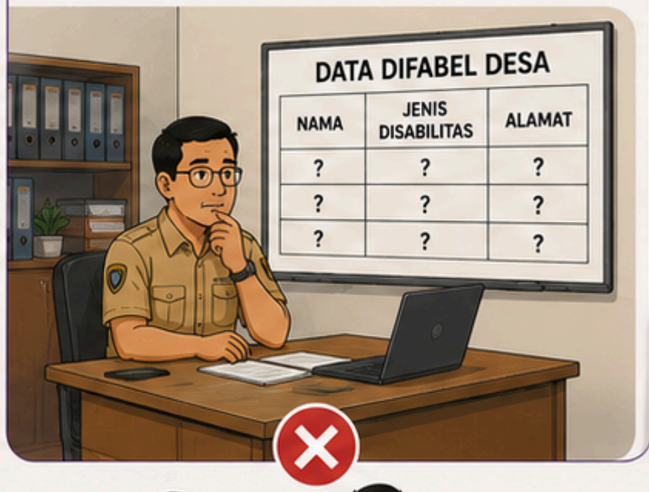
HAMBATAN SOSIAL

- Stigma masyarakat
- Anggapan bahwa difabel tidak mampu menyampaikan aspirasi



HAMBATAN KELEMBAGAAN

- Belum semua desa memiliki data difabel yang akurat
- Belum semua pemerintah desa mengalokasikan ruang khusus partisipasi kelompok rentan



CATATAN

Terkait pelaksanaan Musrenbang : bahwa keterbatasan akses informasi dan minimnya pelibatan masih menjadi kendala utama dalam penyampaiian aspirasi kelompok difabel.



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

STRATEGI PENGUATAN KETERLIBATAN DIFABEL DALAM MUSRENBANG

TINGKAT DESA/KELURAHAN

- Pendataan difabel dan kelompok rentan
- Pelibatan organisasi difabel dalam Musrenbangdes
- Penyediaan fasilitas aksesibilitas
- Penyampaian undangan secara aktif kepada komunitas difabel



TINGKAT KECAMATAN

- Memastikan usulan difabel tidak hilang dalam proses verifikasi
- Menghadirkan perwakilan difabel dalam Musrenbangcam
- Penguatan forum komunikasi lintas sektor



TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- Penyusunan program responsif disabilitas
- Penganggaran berbasis kebutuhan kelompok rentan
- Monitoring pelaksanaan usulan komunitas difabel



Keterlibatan difabel dalam Musrenbang bukan hanya kewajiban, tetapi investasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Semua suara penting, semua warga berhak berpartisipasi!

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

PERAN STRATEGIS KESBANGPOL

Tugas Kesbangpol bukan hanya urusan politik.

KESBANGPOL MEMILIKI MANDAT

MENJAGA

- Persatuan bangsa
- Stabilitas sosial
- Demokrasi
- Partisipasi masyarakat
- Ketahanan sosial masyarakat



KELOMPOK RENTAN YANG TERPINGGIRKAN BERPOTENSI MENGALAMI EKSKLUSI SOSIAL.



EKSKLUSI SOSIAL DAPAT MEMICU:

- Ketidakpercayaan kepada pemerintah
- Konflik sosial
- Ketimpangan pembangunan
- Menurunnya kohesi sosial

Karena itu isu inklusi merupakan bagian dari urusan Kesbangpol.

- MERANGKUL SEMUA
- MEMPERKUAT PERSATUAN
- MENJAGA KEADILAN
- MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL
- MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF

KESBANGPOL HADIR UNTUK PERSATUAN, KEADILAN, DAN INKLUSI.

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

PERAN KESBANGPOL
DALAM PENGUATAN DEMOKRASI INKLUSIF

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

1 PERAN KESBANGPOL DALAM PENGUATAN DEMOKRASI INKLUSIF

Pendidikan Politik

Memberikan pemahaman :

- Hak warga negara
- Hak partisipasi
- Hak menyampaikan aspirasi
- Hak terlibat dalam pembangunan



Pendidikan Demokrasi

Mendorong kelompok rentan :

- Berani berbicara
- Berani menyampaikan usulan
- Berani mengawal kebijakan



2 PERAN KESBANGPOL DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT

Kesbangpol membina dan memfasilitasi :

- Organisasi Kemasyarakatan : termasuk Muhammadiyah Aisyiyah
- Organisasi disabilitas
- Organisasi perempuan
- Organisasi kepemudaan
- Komunitas masyarakat

Tujuannya :
Membangun masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan inklusif.



3 PERAN KESBANGPOL DALAM PENGUATAN KAPASITAS ADVOKASI

Kesbangpol dapat memfasilitasi:

Pelatihan

- Advokasi kebijakan
- Kepemimpinan komunitas
- Penyusunan usulan Musrenbang
- Pengawasan pembangunan



Sehingga komunitas difabel mampu :

"Dari penerima manfaat menjadi penggerak perubahan."

4 PERAN KESBANGPOL DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL

Ketahanan sosial tidak hanya terkait keamanan.
Tetapi juga kemampuan masyarakat:

- Beradaptasi
- Berpartisipasi
- Bekerja sama
- Menyelesaikan masalah secara kolektif



Kelompok rentan yang berdaya akan memperkuat:

- Ketahanan keluarga
- Ketahanan komunitas
- Ketahanan bangsa

5 PERAN KESBANGPOL DALAM KOLABORASI MULTI PIHAK

Kesbangpol dapat menjadi simpul kolaborasi antara:

- Pemerintah
- Organisasi Kemasyarakatan
- Komunitas Difabel
- Akademisi
- Dunia Usaha
- Media



Kolaborasi ini penting untuk memperluas ruang partisipasi kelompok rentan.

KESBANGPOL HADIR UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI, MEMBANGUN DEMOKRASI, DAN MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN.

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

REKOMENDASI KHUSUS
PERAN KESBANGPOL

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah akan kolaboratif menginisiasi :

1 FORUM KOMUNIKASI INKLUSI DAERAH

Melibatkan:

- Organisasi disabilitas
- Organisasi perempuan
- Organisasi masyarakat
- Pemerintah daerah



2 SEKOLAH DEMOKRASI INKLUSIF

Untuk :

- Difabel
- Perempuan
- Pemuda
- Kelompok rentan



3 GERAKAN PARTISIPASI INKLUSIF MUSRENBANG

Mendorong keterlibatan kelompok rentan pada seluruh tingkatan perencanaan pembangunan.



KESBANGPOL

Bersama Kesbangpol,
kita wujudkan Jawa Tengah yang inklusif,
demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

"GERAKAN PARTISIPASI INKLUSIF JAWA TENGAH"

Jawa Tengah
Inklusif dan Berkeadilan

PARTISIPASI DIFABEL, PEMBANGUNAN BERKEADILAN, JAWA TENGAH MAJU!

1 DIFABEL HADIR

Memastikan keterwakilan difabel dalam seluruh forum Musrenbang.



2 DIFABEL DIDENGAR

Memastikan aspirasi dicatat dan dibahas.



3 DIFABEL DILIBATKAN

Terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program.



4 DIFABEL MENGAWASI

Terlibat dalam monitoring pembangunan.



5 DIFABEL MENJADI PEMIMPIN

Mendorong munculnya kader-kader difabel dalam kepemimpinan organisasi masyarakat, forum warga, BPD, lembaga desa, hingga lembaga politik.



Bersama, kita wujudkan Jawa Tengah yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi semua!

KESBANGPOL
Provinsi Jawa Tengah

PENUTUP

> **Tidak ada pembangunan yang inklusif tanpa partisipasi. Tidak ada partisipasi tanpa akses. Dan tidak ada keadilan sosial apabila kelompok rentan masih tertinggal.**

Melalui kolaborasi pemerintah, Kesbangpol, Aisyiyah, organisasi difabel, dan seluruh pemangku kepentingan, kita wujudkan **Jawa Tengah** yang semakin **inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi semua warga tanpa terkecuali.**



PARTISIPASI · AKSESIBILITAS · KEADILAN · KOLABORASI · INKLUSIVITAS · KESETARAAN

MARI BERSAMA, KITA BANGUN JAWA TENGAH YANG TIDAK MENINGGALKAN SIAPA PUN.